



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU RAHADIAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 409935

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.556.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/130 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/85 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 657.500.000
4. Tanah Seluas 8750 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.312.500.000
5. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 270.000.000
6. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 356.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 107.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 63.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.489.554
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.836.489.554
III. HUTANG	Rp.	120.560.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.715.929.554

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.